

BAB II

IDENTITAS SOSIAL YUDHOYONO DALAM MERESPON KEBIJAKAN

PIVOT TO ASIA

2.1. Identitas Sosial Yudhoyono

Identitas Yudhoyono sebagai aktor di dalam Konstruktivisme dapat terbagi menjadi beberapa identitas sosial, seperti identitas sosial sebagai purnawirawan TNI, anggota dari Partai Demokrat, serta bagaimana kondisi pemerintahan sebelum dan ketika Yudhoyono menjadi Presiden Indonesia.

Dalam hal identitasnya sebagai purnawirawan militer, Yudhoyono mendapatkannya dengan memiliki karier di TNI sejak tahun 1974 sampai tahun 1999. Beberapa jabatan berposisi tinggi pernah ditampunya, seperti Panglima Daerah Militer, Ketua Fraksi ABRI, serta Kepala Staf Teritorial ABRI. Selain itu, Yudhoyono juga pernah memiliki pengalaman sebagai bagian dari pasukan PBB, dan mendapatkan pendidikan di Amerika Serikat (Maeswara, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, 2009, pp. 29-37).

Kemudian, sebagai bagian dan salah satu pendiri dari Partai Demokrat. Yudhoyono merupakan anggota dari Partai Demokrat dan juga merupakan salah satu anggota dari Partai tersebut. Partai Demokrat sendiri memiliki visi yang cukup menyinggung permasalahan internasional, seperti disebutkan bahwa Partai Demokrat berusaha untuk menjunjung semangat internasionalisme, yang berada di dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis, dan sejahtera. Selain itu, partai tersebut juga memiliki keinginan untuk memperhatikan pluralisme dan demokrasi,

dan memiliki nilai nasionalis-religius (Maeswara, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, 2009, pp. 214-217).

Nilai nasionalis-religius ini sendiri memiliki arti bahwa Partai Demokrat memiliki wawasan yang nasionalis, tetapi bermoral agama. Selain itu, Partai Demokrat juga menjunjung nilai humanisme, yang diartikan sebagai pengakuan terhadap martabat perikemanusiaan, dan menurut partai tersebut, merupakan pembuktian bahwa Indonesia merupakan bagian integral dari masyarakat dunia (Maeswara, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, 2009, p. 217). Dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa Yudhoyono, sebagai salah satu pendiri dan anggota dari Partai Demokrat, juga memiliki nilai-nilai yang sama dengan partai tersebut, sehingga terdapat identitas sosial Yudhoyono sebagai seorang yang demokrat.

Lalu, kondisi pemerintahan juga turut membentuk identitas sosial Yudhoyono. Kondisi pemerintahan yang dimaksud dapat dilihat melalui karier Yudhoyono ketika beberapa kali menjabat sebagai Menteri, serta bagaimana ia membentuk kabinet serta dukungan dari partai-partai yang mendukungnya. Dalam hal kabinet, khususnya pemilihan Menteri Luar Negeri, Yudhoyono memilih Hassan Wirayuda sebagai Menteri Luar Negeri untuk masa periode pertama pemerintahannya (Merdeka.com, n.d.). Kemudian, Marty Natalegawa menggantikan posisi Wirayuda sebagai Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Yudhoyono untuk periode ke-dua (Merdeka.com, n.d.). Pemilihan posisi tersebut oleh Yudhoyono akan berpengaruh pada arah politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal bagaimana menjalankan kepentingan Yudhoyono sebagai seorang demokrat.

Partai-partai koalisi yang mendukung Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden tahun 2004 sendiri terdiri dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada putaran pertama, yang kemudian Partai Keadilan Sejahtera ikut mendukung Yudhoyono pada putaran kedua Pemilihan Presiden tahun 2004 (DetikNews, 2014). Lalu, untuk Pemilihan Presiden tahun 2009, Yudhoyono hanya dicalonkan oleh Partai Demokrat, dengan dukungan dari beberapa partai pendukung, termasuk Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera (Amrullah, 2009).

2.2. Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Pemerintahan Yudhoyono

Politik luar negeri Indonesia berdasar pada undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini tercantum di pembukaan UUD 1945, pada alinea pertama dan alinea keempat, yang menyebutkan:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”

“Kemudian daripada itu ... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

(DPR RI, n.d.)

Di dalam UUD tersebut, dijelaskan mengenai posisi Indonesia dalam dunia internasional, seperti kepercayaan bahwa kemerdekaan merupakan hak semua bangsa, dan bahwa bentuk-bentuk penjajahan seperti apapun tidak boleh ada di dunia. Dari bagian ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berusaha mengadvokasikan dunia yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Selain itu, juga disebutkan bahwa Indonesia akan ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia, dengan

dasar kemerdekaan, perdamaian dan keadilan. Dasar yang ditetapkan Indonesia untuk politik luar negerinya di dalam UUD sudah menjelaskan garis besar dan arah geraknya dalam perpolitikan global sampai saat ini.

Pada bab I, dijelaskan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia berdasar pada UUD 1945, Pancasila serta garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya dijabarkan bahwa politik luar negeri Indonesia berprinsip bebas aktif, untuk kepentingan nasional, Tidak bersifat rutin dan reaktif, memegang kuat prinsip dan pendirian, juga bersifat rasional dan luwes dalam melaksanakan pendekatan (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Dijabarkan juga beberapa frasa yang terdapat pada UU tersebut untuk membantu pembaca memahaminya. Hal ini termasuk mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang harus mencerminkan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil. Selain itu, disebutkan bahwa UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri, sedangkan garis-garis besar haluan negara merupakan landasan operasional Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kemudian, dijelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia juga berhubungan erat dengan konsep ketahanan nasional, yang mana merupakan cara bagi Indonesia untuk menciptakan daya tangkal dan daya tahan, sehingga Indonesia dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Penjelasan lainnya yang terdapat pada bagian penjelasan UU tentang hubungan luar negeri tersebut adalah mengenai prinsip bebas aktif. Bebas aktif, sebagaimana yang dijelaskan pada UU tersebut, merupakan politik luar negeri Indonesia yang:

“... pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

(Presiden Republik Indonesia, 1999)

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa prinsip bebas dan aktif bukanlah prinsip yang membuat Indonesia menjadi negara yang hanya diam dan tidak bersikap pada isu-isu atau kejadian-kejadian internasional, tetapi sebaliknya, yaitu dengan tetap aktif mempromosikan politik luar negeri yang positif dan bebas dalam memposisikan diri pada politik internasional. Juga disebutkan pada penjelasan tersebut bahwa Indonesia tidak dengan apriori mengikatkan diri kepada suatu kekuatan dunia, yang artinya Indonesia tidak boleh ingin terikat dengan suatu kekuatan dunia dengan prasangka, sebelum mengerti bagaimana keadaan yang sebenarnya.

Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Yudhoyono sendiri dijalankan dengan prinsip *a million friends, zero enemies* (sejuta teman, tiada musuh). Hal ini pertama kali dicanangkan pada saat Yudhoyono memberikan pidato perdananya setelah terpilih sebagai presiden untuk periode keduanya. Prinsip ini

dibutuhkan untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang telah dicanangkan oleh Hatta dan Sjahrir pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu alasan dari penggunaan prinsip ini dapat dilihat dari sisi HAM. Prinsip *a million friends, zero enemy* diterapkan agar Indonesia dapat memilih posisi yang tidak terlalu keras dalam hal HAM, yang mana mampu merusak hubungan dengan negara ekonomi besar yang memiliki catatan HAM yang buruk, seperti Tiongkok. Tidak hanya itu, komitmen Indonesia dalam hal HAM di panggung internasional juga tidak berada dalam posisi yang keras, yang mana merupakan luaran dari belum selesainya beberapa isu HAM domestik. Meskipun demikian, Indonesia di masa pemerintahan Yudhoyono berperan aktif dalam mempromosikan HAM dan demokrasi pada tingkat regional. Seperti, usaha Indonesia untuk mendorong Myanmar mentransisikan negaranya menjadi negara demokrasi. Lalu, Indonesia juga merupakan negara yang menjalankan *Bali Democracy Forum* (BDF) untuk mempromosikan demokrasi pada tahun 2008, yang merupakan wadah bagi pemerintah di kawasan Asia-pasifik untuk berbicara mengenai kemajuan demokrasi di kawasan tersebut. Selain itu, juga dibentuk *Institute for Peace and Democracy* (IPD) pada tahun 2008 untuk mendukung tujuan dari BDF, melalui cara-cara seperti pembangunan jaringan, publikasi, serta peningkatan kapasitas. Dalam hal ini, pemilihan *a million friends, zero enemies* merupakan langkah yang digunakan agar Indonesia dapat berada di tengah-tengah, terutama dalam hal HAM dan mempromosikan demokrasi (Piccone & Yusman, 2014).

Di sisi lain, prinsip *a million friends, zero enemy* dipandang sebagai diplomasi yang dapat mengarah ke segala sisi, di mana Indonesia mampu menjalankan peranan yang lebih besar pada tingkat kawasan di satu sisi, sementara

pada sisi yang lain dapat secara aktif memperkuat hubungan pertemanan yang lebih aktif dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Prinsip ini sendiri didasari pada sebuah doktrin yang disebut sebagai 'Doktrin Natalegawa', yang berasal dari nama Menteri Luar Negeri RI di masa Yudhoyono, yaitu Marty Natalegawa. Doktrin ini memberikan pandangan yang memosisikan Indonesia pada 'ekuilibrium dinamis' (*dynamic equilibrium*) pada politik internasional. Maksud dari istilah ini adalah pandangan bahwa kondisi politik internasional pada saat pengenalan istilah tersebut sedang kondusif bagi kemajuan negara-negara kekuatan baru, dengan anggapan bahwa negara-negara berkembang menjadi semakin tidak tergantung dengan negara berkekuatan dominan. Doktrin ini juga memandang bahwa kebangkitan Tiongkok dan India sebagai hal yang tidak mengancam bagi Indonesia. Dari hal ini, Yudhoyono sendiri telah menekankan pentingnya untuk membentuk sebuah kerja sama jangka panjang yang berdasar pada kepentingan bersama bagi negara-negara yang berada di daerah Samudra Hindia. Penekanan yang diberikan Yudhoyono juga memberikan gambaran bahwa sangat penting untuk mencegah kemungkinan bahwa negara-negara di daerah tersebut akan bermusuhan (Mendiolaza & Hardjakusumah, 2013).

2.3. Respon Indonesia terhadap Kebijakan *Pivot to Asia*

Kebijakan *pivot to Asia* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada masa kepresidenan Barack Obama. *Pivot to Asia* pertama kali dicanangkan oleh pemerintahan Obama pada musim gugur tahun 2011 dan pada awal tahun 2012, yang pada saat itu disebutkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan usaha yang lebih intensif dalam berperan di kawasan Asia-Pasifik. Kebijakan ini dilakukan dengan lebih memprioritaskan perencanaan militer

Amerika Serikat, kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Tujuan Obama dalam menjalankan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa Amerika Serikat akan memainkan peranan yang lebih besar dan secara jangka panjang memainkan peranan dalam membentuk kawasan Asia-Pasifik serta masa depan dari kawasan tersebut. Menurut Tom Donilon, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat adalah bagaimana negara tersebut membantu untuk membentuk norma serta aturan-aturan di kawasan Asia-Pasifik, atau sebagaimana yang dimaksud oleh Donilon:

'agar norma-norma serta hukum internasional dapat ditaati, perdagangan dan kebebasan navigasi (freedom of navigation) tidak dihambat, agar negara emerging powers dapat meningkatkan kepercayaan dengan negara tetangga mereka, dan agar ketidaksepakatan dapat diselesaikan dengan cara yang damai tanpa ancaman ataupun kekerasan'

(Manyin, et al., 2012, p. 1)

Pivot to Asia juga merupakan bentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan setelah dilakukan tinjauan oleh pemerintahan Obama, yang dimulai sejak tahun 2008. Di dalam tinjauan tersebut, ditemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam fokus Amerika Serikat terhadap kepentingannya terhadap dunia. Ketidakseimbangan ini dinilai melalui presensi kekuatan militer Amerika Serikat yang terlalu banyak di Eropa dan di kawasan Timur Tengah. Melihat condongnya kekuatan Amerika Serikat di dalam ke dua kawasan tersebut,

pada tahun 2011, Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu menandakan langkah awal Amerika Serikat untuk memperluas peranan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Secara umum, terdapat 6 poin utama yang dilakukan Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakan *pivot to Asia*, yaitu: memperluas perdagangan dan investasi, meningkatkan kehadiran secara militer, memajukan demokrasi serta HAM, memperkuat hubungan dengan *emerging powers*, dan menjalin hubungan dengan institusi multilateral di kawasan (Mills, 2015, p. 1).

Dalam tulisan yang dibuat oleh Hillary Clinton pada tahun 2011, terdapat banyak pendalaman yang dapat dilakukan untuk memahami *pivot to Asia*. Hillary memandang bahwa peningkatan hubungan dengan negara-negara di Asia, baik itu dalam hal diplomasi, ekonomi, strategis ataupun dalam sektor-sektor lain merupakan hal yang penting bagi kepentingan Amerika Serikat. Ia menyebutkan, dalam 10 tahun setelah tahun 2011, Amerika Serikat harus menjadi aktor yang mampu mempertahankan kepemimpinan dan kepentingannya, serta mempromosikan nilai-nilai yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat berusaha untuk mengimplementasikan ketiga hal tersebut dalam rangka kebijakan *pivot to Asia*, serta memilih Asia sebagai tujuan utamanya. Hillary juga melihat bahwa kawasan Asia-Pasifik saat ini sudah menjadi pemain utama dalam perpolitikan di dunia. Secara strategis, Ia memandang bahwa populasi Asia-Pasifik yang hampir mencakup setengah populasi dunia dan kondisi geografis Asia yang terdiri dari dua lautan serta melingkupi wilayah yang sangat luas merupakan kunci utama bagi penggerak dalam perekonomian global. Tiongkok,

Indonesia dan India pun dipandang sebagai rekan strategis bagi Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakannya tersebut (Clinton, 2011).

Amerika Serikat memulai kebijakan *pivot to Asia* pertama kali dengan melakukan kunjungan kenegaraan pertama Hillary setelah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Asia. Hillary sendiri mendeskripsikan strategi untuk menjalankan kebijakan ini terhadap kawasan Asia sebagai *forward-deployed diplomacy*. Apa yang dimaksud dengan strategi diplomasi ini adalah bagaimana Amerika Serikat mengerahkan seluruh aset-aset diplomatiknya, seperti pejabat tingkat tinggi, para ahli atau aset-aset permanen, kepada setiap negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Amerika Serikat menerapkan langkah ini dengan pandangan bahwa saat ini, terdapat perubahan yang ‘dramatis’ dan ‘cepat’ di Asia, sehingga penerapan strategi *forward-deployed diplomacy* diharapkan dapat relevan dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan tersebut (Clinton, 2011).

Dalam hal bagaimana Indonesia merespon kebijakan tersebut, dapat dilihat melalui penjelasan berikut. Amerika Serikat memandang bahwa Indonesia merupakan negara dengan demokrasi terbesar di dunia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, dan juga sebagai negara yang menjadi anggota dari G-20. Amerika Serikat dan Indonesia telah melanjutkan latihan gabungan bagi militer berkeahlian spesial mereka, serta telah menandatangani berbagai perjanjian dalam hal kesehatan, pertukaran pelajar dalam hal pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan. Selain itu, pada tahun 2011, Obama telah mengesahkan keikutsertaan Amerika Serikat dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit*). Meskipun demikian, masih terdapat

beberapa tantangan dalam hubungan kedua negara, seperti menyelesaikan permasalahan birokrasi, kecurigaan yang diakibatkan oleh kejadian di masa lampau, serta kesenjangan dalam memahami perspektif serta kepentingan di antara Indonesia dan Amerika Serikat (Clinton, 2011).

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia sendiri telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi beberapa peningkatan dan penurunan tingkat hubungan antara kedua negara. Seperti hubungan di masa Presiden Sukarno yang buruk dikarenakan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Indonesia yang menjadi komunis di masa pemerintahan Sukarno, lalu kemudian pasang-surut di masa pemerintahan Presiden Suharto – mulai dari bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia dalam aneksasi Timor Leste, memburuk ketika Kongres Amerika Serikat menghentikan bantuan pelatihan militer kepada Indonesia, sampai peranan Amerika Serikat dalam krisis finansial Indonesia tahun 1997-1998 yang membuat kurangnya kepercayaan Indonesia terhadap Amerika Serikat di masa tersebut. Masa lalu hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia pada diwarnai dengan kasus HAM dan ketidaksukaan Indonesia terhadap perang Amerika Serikat terhadap Irak pada masa pemerintahan George W. Bush, karena masyarakat Indonesia melihat hal tersebut merupakan peperangan terhadap Islam dan melanggar norma-norma Internasional (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2010, pp. 395-398).

Ketika Yudhoyono menjadi Presiden RI, hubungan antara kedua negara mulai membaik. Hal ini ditandai dengan bantuan Amerika Serikat terhadap Indonesia ketika terjadi Tsunami pada 26 Desember 2004. Kemudian perbaikan hubungan dilanjutkan dengan dilanjutkannya kembali bantuan pelatihan militer

serta menghapus larangan kongres terhadap Bantuan Finansial Militer (BFM – *Foreign Military Financing, FMF*) pada tahun 2005, yang membuat hubungan militer antar kedua negara membaik. Kedua hal tersebut dilakukan ketika George W. Bush masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2008, setelah Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, Yudhoyono berusaha menawarkan proposal *US-Indonesia Comprehensive Partnership* terhadap Amerika Serikat, yang mencakup kerja sama pada beberapa sektor, seperti: perdagangan dan investasi, pendidikan, keamanan dan pertahanan, kesehatan, energi dan isu-isu transnasional seperti non-proliferasi nuklir serta perubahan iklim. Di tahun ini juga, perspektif masyarakat Indonesia berubah, melihat hasil dari pemilihan Presiden Amerika Serikat yang memenangkan Obama. Lalu di tahun 2010, ketika Robert Gates, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengunjungi Indonesia, ia mengumumkan untuk menghentikan larangan hubungan dan bantuan terhadap Kopassus. Hilary Clinton dan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri dari kedua negara, melakukan pertemuan bilateral pertama dalam hal *Comprehensive Partnership* dan mulai mengumumkan rencana kerja untuk melaksanakan hal tersebut. Pada akhir tahun 2010 di Bulan November, Obama mengunjungi Indonesia dalam rangka turnya di Asia (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2010, pp. 395-398).

US-Indonesia Comprehensive Partnership sendiri mulai dijalankan pada November 2010. Dari beberapa sektor yang disebutkan di atas, telah terdapat beberapa perkembangan yang terjadi. Pertama, dimulainya negosiasi nota kesepahaman dalam *South-South and Triangular Cooperation (SSTC)* oleh Kelompok Kerja Demokrasi dan Masyarakat Sipil dalam hal membangun institusi

yang demokratis, pemerintahan yang baik, serta kesiapan dalam menghadapi bencana. Kedua, dalam Kelompok Kerja Pendidikan, Kerja Sama untuk Pendidikan Tinggi USAID memperluas kesempatan untuk studi bilateral serta pertukaran riset, peningkatan kerja sama universitas, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Hal lainnya adalah dijalankannya program Fullbright untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia dan hubungan antar-individu kedua negara, serta juga terdapat program PRIORITAS USAID, yang berusaha membangun pendidikan dasar di Indonesia. Ketiga, pada Kelompok Kerja Lingkungan dan Iklim, telah dilaksanakan usaha untuk melembagakan Pusat Perubahan Iklim Indonesia untuk memastikan bahwa pendekatan ilmiah digunakan dalam hal pengambilan keputusan, khususnya untuk isu lingkungan. Keempat, dalam Kelompok Kerja Energi, kedua negara berusaha mempromosikan teknologi serta kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan, dalam rangka membantu Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya, meningkatkan akses terhadap energi, serta mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca pada sektor energi. Dan pada Kelompok Kerja kelima, Perdagangan dan Investasi, dilakukan usaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi antar kedua negara, dengan melihat pada Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (*PKKPI – Trade and Investment Framework Agreement, TIFA*) (U.S. Department of State, 2013).

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat juga dapat menguntungkan bagi Indonesia, baik secara militer maupun ekonomi. Selain dari pada kesepakatan dan kemajuan yang disebutkan di atas, secara ekonomi, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mulai melihat Asia sebagai pasar untuk menjual produk ataupun

jasa yang mereka miliki. Meningkatnya basis konsumen serta pendapatan di Indonesia memberikan para pebisnis dari Amerika Serikat gambaran bahwa ekonomi Indonesia merupakan ekonomi yang baik. Dalam hal militer, Amerika Serikat dapat mengekspor peralatan militernya ke Indonesia, yang mana telah terdapat peningkatan anggaran pertahanan sejak 2005-2013. Beberapa kesepakatan pembelian persenjataan dengan Amerika Serikat telah dilaksanakan, seperti pembelian misil untuk pesawat tempur F-16 senilai AS\$ 25 juta, pembelian pesawat tempur F-16 sebanyak 24 armada senilai lebih dari AS\$ 350 juta, serta rencana pembelian helikopter Apache senilai AS\$ 1.4 miliar (Mendiolaza & Hardjakusumah, 2013).